

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi suatu Negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan suatu Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut (Kasmir, 2004: 7).

Selain mampu mempengaruhi kegiatan perekonomian, peran strategis perbankan yaitu mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien sehingga dapat menjadi prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran kegiatan perekonomian (Susilo dkk, 2000: 7).

Bank merupakan perusahaan atau lembaga keuangan yang dimaksudkan sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu jenis bank yang merupakan *agent of development* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah bank umum. Bank umum (Hasibuan, 2005: 36) merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan pengalokasian dana yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat, bank umum menyalurkan dananya melalui salah satu jasanya yaitu kredit. Menurut Hasibuan (1996:46) yang dimaksud dengan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada dasarnya pemberian kredit diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan mengutamakan pengusaha golongan ekonomi lemah. Kebijakan pemberian kredit sejak tahun 1974 terutama ditujukan untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi lemah serta memperlancar penyelenggaraan impor bahan baku dan penolong yang sangat diperlukan untuk menunjang laju pembangunan (Rahardja, 1997: 106).

Dalam perbankan jenis kredit dibedakan menjadi 3 yaitu kredit investasi, modal kerja dan konsumsi. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) penyerapan kredit yang diberikan oleh bank umum di

Indonesia periode 2012 hingga 2013, penyerapan kredit yang paling besar yaitu pada kredit modal kerja. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini :

TABEL 1.1
Pemberian Kredit Bank Umum di Indonesia Tahun 2012-2013
(Dalam Milyar Rupiah)

| No | Jenis Kredit | 2012 | 2013 |
|----|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Modal Kerja | 1.316.689 | 1.585.659 |
| 2 | Konsumsi | 799.748 | 909.058 |
| 3 | Investasi | 591.425 | 798.157 |

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI)

Penyaluran kredit bank umum di Indonesia periode tahun 2012 sampai 2013 berdasarkan tabel 1.1 diatas mengalami peningkatan setiap tahunnya pada ketiga jenis kredit yaitu kredit modal kerja, kredit konsumsi dan kredit investasi. Dari ketiga jenis kredit, kredit modal kerja merupakan kredit yang paling tinggi penyerapannya apabila dibandingkan dengan kredit konsumsi dan kredit investasi.

Besarnya jumlah penyaluran kredit di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi kota-kota besar yang ada di Indonesia khususnya kota besar yang ada di provinsi pulau jawa. Berdasarkan data yang berasal dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yaitu data penyaluran kredit di provinsi yang ada di pulau jawa, secara garis besar provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang penyaluran kreditnya paling besar yang ada di pulau jawa, sementara provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang penyaluran kreditnya paling rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada dipulau jawa. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

TABEL 1.2
Penyaluran Kredit Bank Umum di Pulau Jawa Tahun 2012-2013
(Dalam Milyar Rupiah)

| No | Keterangan | 2012 | 2013 |
|----|----------------|------------|------------|
| 1 | Jawa Barat | 2.332.561 | 2.930.606 |
| 2 | Banten | 701.130 | 831.289 |
| 3 | DKI Jakarta | 14.290.382 | 17.332.750 |
| 4 | D.I Yogyakarta | 200.435 | 243.668 |
| 5 | Jawa Tengah | 1.600.443 | 1.932.258 |
| 6 | Jawa Timur | 2.530.945 | 3.210.834 |

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI)

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa penyaluran kredit bank umum di provinsi yang ada di pulau jawa terus meningkat dari tahun 2012 sampai 2013. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah alokasi kredit terbesar bila dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya, sementara provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi yang jumlah alokasi kreditnya rendah. Hal ini dikarenakan provinsi DIY merupakan kawasan wisata dan kota pendidikan bukan daerah industri ataupun kawasan pabrik sehingga jumlah industri yang ada di DIY bisa dihitung ataupun sangat sedikit, hal tersebut tentu mempengaruhi besarnya jumlah alokasi kredit di DIY.

Besarnya jumlah alokasi kredit di DIY bila dilihat dari jenis penggunaan kredit, kredit konsumsi menjadi kredit yang alokasinya paling besar pada bank umum di DIY bila dibandingkan dengan kredit investasi dan kredit modal kerja yang merupakan kredit produktif, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

TABEL 1.3
Penyaluran Kredit Bank Umum di DIY Tahun 2012-2013
(Dalam Milyar Rupiah)

| No | Jenis Kredit | 2012 | 2013 |
|----|--------------|--------|--------|
| 1 | Modal Kerja | 29,085 | 33,790 |
| 2 | Konsumsi | 30,613 | 34,752 |
| 3 | Investasi | 11,126 | 16,528 |

Sumber : Laporan Perkembangan Perekonomian DIY

Pada tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa alokasi kredit terbesar bank umum di DIY yaitu pada kredit konsumsi. Pada tahun 2012 jumlah penyaluran kredit konsumsi sebesar Rp30,613 milyar, sementara penyaluran kredit modal kerja hanya sebesar Rp29,085 milyar dan jumlah penyaluran kredit terendah pada kredit investasi yaitu sebesar Rp11,126 milyar. Penyaluran kredit bank umum di DIY pada tahun 2013 tidak jauh berbeda pada tahun 2012, kredit konsumsi masih menjadi kredit yang penyalurannya lebih tinggi bila dibandingkan kredit modal kerja dan kredit investasi. Penyaluran kredit konsumsi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp34,752 milyar, sementara penyaluran kredit modal kerja hanya sebesar Rp33,790 dan kredit investasi tersalurkan hanya sebesar Rp16,528 milyar. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit tertinggi bank umum di DIY yaitu kredit konsumsi, sementara kredit investasi merupakan kredit yang paling rendah penyalurannya pada bank umum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Secara umum sebagian besar penyaluran kredit bank umum di DIY disalurkan pada sektor tidak produktif. Sektor yang paling besar menyerap kredit perbankan DIY adalah sektor konsumsi yang merupakan bukan sektor lapangan usaha. Kredit konsumtif biasanya digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pribadi seperti kredit rumah, mobil, motor dan sebagainya sehingga kredit ini tergolong kredit yang tidak produktif. Berbeda dengan kredit modal kerja yang merupakan kredit untuk memenuhi kebutuhan modal usaha (perdagangan) sehingga kredit ini mampu meningkatkan laju perekonomian daerah justru jumlah dana kredit yang tersalurkan lebih rendah.

Penyaluran kredit perbankan sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), suku bunga pinjaman, BI Rate, *Non Performing Loan* (NPL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan sebagainya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia, menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial variabel dana pihak ketiga, NPL dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia. Penelitian lain mengenai penyaluran kredit modal kerja juga pernah dilakukan oleh Meisthya dan Sudirman (2013) di Bali dengan variabel independen *Non Performing Loan* (NPL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ketidakpastian makroekonomi dan krisis global. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja, variabel PDRB menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit modal kerja, sementara variabel ketidakpastian ekonomi dan krisis global tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja. Binangkit (2014) juga melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL) dan suku bunga pinjaman terhadap penyaluran kredit

modal kerja, investasi dan konsumsi Bank Pembangunan Daerah (BPD), hasil analisis pembahasan pada variabel dependen kredit modal kerja menunjukkan DPK memiliki pengaruh yang signifikan dan paling dominan mempengaruhi penyaluran kredit, pada variabel independen NPL menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit modal kerja dimana kenaikan jumlah NPL akan menyebabkan kenaikan pada kredit modal kerja atau sebaliknya, selain itu pada variabel independen suku bunga pinjaman menunjukkan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit modal kerja, kenaikan suku bunga pinjaman akan menyebabkan penurunan kredit modal kerja begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti penyaluran kredit modal kerja pada Bank Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipengaruhi oleh dana pihak ketiga, suku bunga BI Rate dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka dari itu penulis dalam menyusun penelitian memilih judul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), BI RATE DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Dibatasi hanya pada periode tahun 2007-2014
2. Hanya menggunakan variabel independen sebagai berikut, Dana Pihak Ketiga (DPK), Suku Bunga BI Rate dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja pada Bank Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah suku bunga BI Rate berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja pada Bank Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja pada Bank Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran kredit modal kerja pada Bank Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh BI Rate terhadap penyaluran kredit modal kerja pada Bank Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja pada Bank Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat ilmiah

- a. Bagi penulis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menganalisis serta mengidentifikasi realisasi dinamika dalam dunia perbankan khususnya dalam dalam alokasi kredit modal kerja bank umum.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan tentang pengaruh dana pihak ketiga, suku bunga BI Rate dan produk domestik regional bruto terhadap penyaluran kredit modal kerja bank umum khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran bagi dunia perbankan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit modal kerja.